

**ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN DAN NON KEPULAUAN DI SULAWESI UTARA***COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF ISLAND AND NON-ISLAND DISTRICT GOVERNMENTS IN NORTH SULAWESI*

Oleh:

**Veron Walcer Euaggelyon Ratu<sup>1</sup>****Joubert Barens Maramis<sup>2</sup>****Lawren Julio Rumokoy<sup>3</sup>**<sup>123</sup>Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1veronratu@gmail.com](mailto:1veronratu@gmail.com)[2joubertmaramis@unsrat.ac.id](mailto:2joubertmaramis@unsrat.ac.id)[3juliorumokoy@unsrat.ac.id](mailto:3juliorumokoy@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan di Sulawesi Utara ditinjau dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif (perbandingan) dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Sampel yang digunakan berjumlah 6 Kabupaten/Kota yang dipilih dengan menggunakan pendekatan *Simple Random Sampling* yang terdiri atas 30 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Analisis Deskriptif dan Uji Beda Rata-Rata dengan metode *Independent Sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan ditinjau dari rasio ketergantungan dan rasio efektivitas tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan daerah, APBD

**Abstract:** This study aims to determine the comparison of the financial performance of the Islands and non-islands Regency Regional Governments in North Sulawesi in terms of the independence ratio, dependency ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and activity ratio. This type of research is comparative research (comparison) using secondary data. The population in this study were 15 districts / cities in North Sulawesi. The sample used amounted to 6 districts / cities selected using the *Simple Random Sampling* approach consisting of 30 Local Government Financial Reports. The data analysis method used is *Descriptive Analysis Test* and *Average Difference Test* with *Independent Sample t-test* method. The results showed that the financial performance of the Islands and non-Islands Regency Regional Governments in terms of the independence ratio, efficiency ratio, and activity ratio showed a significant difference. Meanwhile, in terms of the dependency ratio and effectiveness ratio, it does not show a significant difference.

**Keywords:** local government financial performance, regional financial ratios, APBD

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Pemerintah Daerah), dijelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah adalah wujud keterlibatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lewat perencanaan potensi sumber daya yang ada. Diberikannya hak dan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam hal mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan daerah masing-masing, Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya. Berangkat dari hal di atas maka perlu dilaksanakan pengukuran kinerja terhadap daerah tersebut.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), Keberhasilan pemerintah daerah tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan, dimana surplus ataupun defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan pemerintah daerah juga harus diukur dari kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik (didalamnya pemerintah daerah) bukanlah hal mudah, salah satunya disebabkan karena tidak adanya sebuah teknik atau cara baku untuk melakukannya. Menurut Mardiasmo (2013), Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Pengukuran kinerja keuangan sektor publik bisa menjadi evaluasi bahkan memulihkan kinerja, namun disisi lain pengukuran kinerja juga bisa digunakan sebagai suatu tolak ukur dalam meningkatkan kinerja khususnya keuangan daerah di masa yang akan datang.

**Tabel 1. Laporan Realisasi & Anggaran Tahun 2014 -2018 Kabupaten/Kota**

<b>Pendapatan Daerah</b>					
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sangihe	98,32%	98,89%	91,83%	99,15%	102,41%
Talaud	96,13%	98,52%	96,21%	95,70%	96,41%
Siau Tagulandang Biaro	98,08%	99,72%	92,30%	98,62%	93,44%
Minahasa	99,14%	99,90%	92,56%	100,86%	99,31%
Bitung	102,15%	99,81%	95,10%	106,83%	98,43%
Tomohon	98,13%	96,74%	97,41%	99,03%	97,55%
<b>Belanja Daerah</b>					
Sangihe	92,59%	91,56%	87,90%	92,60%	82,26%
Talaud	83,42%	89,61%	92,81%	94,37%	92,29%
Siau Tagulandang Biaro	84,90%	90,45%	88,29%	96,07%	87,64%
Minahasa	90,22%	89,50%	86,38%	94,54%	93,81%
Bitung	90,94%	93,55%	89,89%	96,22%	93,40%
Tomohon	89,89%	89,46%	89,58%	90,28%	93,75%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diolah (2023)

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan wilayah kepulauan dan non kepulauan belum maksimal dalam hal realisasi pendapatan daerah, hal ini dikarenakan hampir semua wilayah kepulauan dan non kepulauan memiliki persentase angka realisasi pendapatan daerah ada dibawah angka 100%, yang berarti pemerintah belum mampu memperoleh pendapatan daerahnya sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah secara keseluruhan wilayah kepulauan dan non kepulauan sudah maksimal dalam hal realisasi belanja daerah, hal ini dikarenakan wilayah kepulauan dan non kepulauan memiliki persentase angka realisasi belanja daerah ada dibawah angka 100%, yang berarti pemerintah mampu meminimalisir belanja daerahnya sehingga tidak mencapai anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Hasil-hasil di atas didukung dengan adanya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Pandensolang dan Mangantar (2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro ditinjau dari analisis rasio keuangan daerah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana kedua kabupaten ini masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat dalam urusan keperintahannya. Penelitian Mailangkay, Murni dan Untu (2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan Kota Bitung masih belum maksimal, dimana Kota Bitung juga masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Penelitian Rieuwpassa, Mangantar dan Maramis (2021) menyatakan bahwa kinerja keuangan di Kota Manado, Tomohon dan Bitung tidak terdapat perbedaan, dimana ketiga kota ini masih sangat kurang sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat didalamnya.

Pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat dan menilai akuntabilitas pemerintah. Untuk dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah maka harus dilakukan analisis kinerja keuangan. Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007).

Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan adalah dengan menganalisis derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio indeks kemampuan rutin, rasio ketergantungan keuangan daerah. Hasil perhitungan dari rasio keuangan bisa digunakan pemerintah daerah dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dalam melakukan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya untuk belanja modal, dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Susantih dalam Nurabiah, 2018). Analisis rasio keuangan dalam APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya atau satu daerah dengan daerah yang lain untuk melihat perbedaannya.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan diukur dari rasio kemandirian
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan diukur dari rasio ketergantungan
3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan diukur dari rasio efektivitas
4. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan diukur dari rasio efisiensi
5. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan diukur dari rasio aktivitas

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah)**

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara, menjelaskan bahwa APBD/Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Windhu, 2018). Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan..

#### **Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah atau Standar Penyusunan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu penyajian data keuangan yang meliputi catatan-catatan yang menyertainya (jika ada) dan dimaksudkan untuk menyampaikan sumber daya ekonomi (aset dan/atau kewajiban) suatu entitas pemerintah atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban dalam suatu periode tertentu.

#### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 menjelaskan suatu output atau hasil dari suatu kegiatan yang akan dan/atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan jumlah dan kualitas yang terukur disebut sebagai kinerja. Menurut Halim (2016), Kinerja Keuangan Daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Menurut Windhu (2018), Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu dan mengevaluasi kinerja manajemen maka dilakukan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan, hal

ini dikenal sebagai analisis rasio keuangan. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, maka analisis rasio keuangan APBD digunakan untuk memeriksa laporan keuangan khusus pemerintah daerah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya. Berikut beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

### Penelitian Terdahulu

Penelitian Rieuwpassa, Mangantar dan Maramis (2021) bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah penelitian ini dilakukan pada tiga kota dengan menggunakan rasio kemandirian desentralisasi, efisiensi, efektivitas, Pertumbuhan, Ketergantungan, dan Keserasian. data penelitian ini adalah laporan dan realisasi APBD pada Kota Manado Kota Bitung dan Kota Tomohon oleh karena itu, sebanyak lima tahun laporan keuangan APBD dari tahun 2013 sampai 2018 akan di jadikan data analisis penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan uji beda one way anova dan independent sampel test hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon tidak terdapat perbedaan.

Penelitian Pandensolang dan Mangantar (2020) bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe dan kepulauan sitaro. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2013-2015. Untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan pada LRA seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kepulauan sangihe dan sitaro jika dilihat dari semua rasio. Tingkat kemandirian dari sangihe dan sitaro mengalami penurunan dan kenaikan disetiap tahun hal ini membuat sangihe dan sitaro berada di kriteria sangat kurang, tingkat efektivitas kedua kepulauan sangat efektif karena rata-rata memiliki kinerja yang sangat baik, dari efisien kepulauan sangihe dan sitaro tidak terdapat perbedaan, tingkat pertumbuhan dari kedua kepulauan ini tergolong belum stabil karna dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan dan penurunan dan dari pertumbuhan kedua kepulauan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik namun pertumbuhan kepulauan siau lebih tinggi dari pada kepulauan sangihe.

Penelitian Waoma (2019) bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah, adakah perbedaan, dan peringkat berapakah kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio, analisis manova dan analisis rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi sangat kurang, rasio ketergantungan daerah sangat baik, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik. Adanya perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio

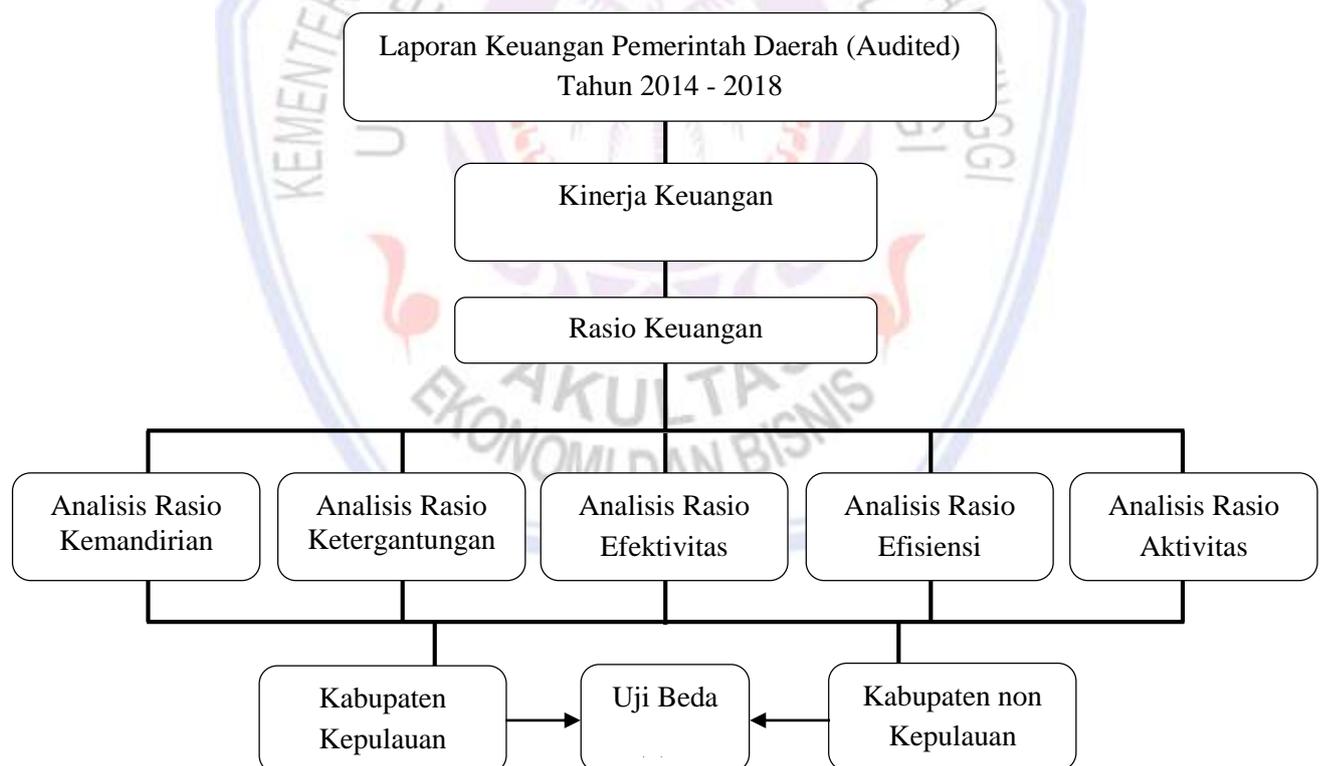
ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Peringkat kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi adalah urutan pertama Kabupaten Nias disusul Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Pada rasio ketergantungan keuangan daerah ditempati secara berturut-turut oleh Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan terakhir Kabupaten Nias. Pada kemandirian keuangan daerah posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Nias selanjutnya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

### Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :

- H1: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.
- H2: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.
- H3: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.
- H4: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.
- H5: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio aktivitas belanja rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.
- H6: Terdapat perbedaan yang signifikan rasio aktivitas belanja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.

### Model Penelitian



**Gambar 1. Model Penelitian**  
Sumber: Kajian Teori, (2023)

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif (perbandingan), yang menggambarkan sifat-sifat dan

situasi nyata dari dua atau lebih objek penelitian, yang kemudian dibandingkan untuk menemukan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti (Sugiyono, 2010).

### Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2010), Wilayah generalisasi yang disebut "populasi" terdiri dari hal-hal atau orang-orang yang sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan. Jumlah populasi 15 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara. Menurut Sugiyono (2010) sifat dan jumlah yang ada dalam suatu bagian yang akan mewakili populasi disebut sampel. Jumlah sampel 30 laporan keuangan pemerintah daerah yang terbagi atas 15 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan tahun anggaran 2014 – 2018 (3 kabupaten) dan 15 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota non kepulauan tahun anggaran 2014 – 2018 (3 kabupaten). Metode *Sampling* yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*/Sampling Acak Sederhana. Menurut Margono (2004), metode ini digunakan dalam rangka untuk menentukan sampel langsung pada bagian terkecil populasi/ unit sampel. Dimana semua unit sampel yang merupakan unsur populasi yang terkecil akan mendapat peluang yang sama besar untuk mewakili populasi.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data angka yang diperoleh dengan berbagai alternatif seperti kuesioner, observasi langsung atau dokumentasi, pengolahan data (Riyanto dan Hatmawan, 2020). Sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari pihak tertentu yang telah mengumpulkan data tersebut (Riyanto dan Hatmawan, 2020). Data sekunder dalam penelitian ini adalah 15 Data Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan dan 15 Data Laporan Keuangan Kabupaten non Kepulauan di Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2018.

### Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Menurut Suharso (2009), dokumentasi adalah suatu rekaman data sekunder berbentuk dokumen ataupun catatan/file, buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data diambil melalui Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara.

### Metode Analisis Data

Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mengarahkan kepada suatu penggambaran, peringkasan dari suatu objek, fenomena, atau data yang dikumpulkan, dengan penjelasan menggunakan angka. Dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Uji Statistik Deskriptif merupakan suatu uji yang memberikan gambaran atau ringkasan data, serta digunakan untuk memprediksi variable-variabel yang akan diteliti. Uji statistik deskriptif menggunakan alat analisis rata-rata (mean) dan standar deviasi. Analisis perbandingan merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk membandingkan objek yang berbeda dalam variabel atau instrumen yang sama. Analisis perbandingan dalam penelitian ini adalah pengujian perbedaan signifikan menggunakan alat uji beda rata-rata (*Independent Sample t-test*). Uji beda rata-rata menggunakan analisis *Independent Sample t-test* yang bertujuan untuk menguji adanya perbedaan yang signifikan antara dua sampel bebas atau tidak berpasangan. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05 dengan tingkat keyakinan 95%. Dengan kriteria sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan yaitu :

1. Jika nilai signifikansi (*sig.*) lebih dari nilai profitabilitas 0,05, menunjukkan H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan variabel yang signifikan antara dua kelompok sampel.
2. Jika nilai signifikansi (*sig.*) kurang dari nilai profitabilitas 0,05, menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan variabel yang signifikan antara dua kelompok sampel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Deskriptif

Dilihat dari rasio kemandirian kabupaten kepulauan mendapat angka *mean* 4,80% sedangkan untuk kabupaten non kepulauan mendapat angka *mean* 8,97%. Rasio ketergantungan kabupaten kepulauan mendapat angka *mean* 91,82% sedangkan untuk kabupaten non kepulauan mendapat angka *mean* 90,23%. Rasio efektivitas kabupaten kepulauan mendapat angka *mean* 100,16% sedangkan untuk kabupaten non kepulauan mendapat angka

*mean* 97,70%. Rasio efisiensi kabupaten kepulauan mendapat angka *mean* 89,15% sedangkan untuk kabupaten non kepulauan mendapat angka *mean* 95,35%. Rasio aktivitas belanja rutin kabupaten kepulauan mendapat angka *mean* 30,63% sedangkan untuk kabupaten non kepulauan mendapat angka *mean* 33,81%. Rasio aktivitas belanja pembangunan kabupaten kepulauan mendapat angka *mean* 11,61% sedangkan untuk kabupaten non kepulauan mendapat angka *mean* 11,12%.

**Tabel 1. Descriptive Statistic Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan**

Rasio	Kab. Kepulauan		Kab non Kepulauan	
	Mean	Std. Dev	Mean	Std. Dev
Kemandirian (%)	4,80	1,85	8,97	4,41
Ketergantungan (%)	91,82	4,86	90,23	4,15
Efektivitas (%)	100,16	25,33	97,70	10,11
Efisiensi (%)	89,15	5,93	95,35	7,64
Aktivitas (Belanja Rutin) (%)	30,63	3,22	33,81	2,30
Aktivitas (Belanja Pembangunan) (%)	11,61	3,40	11,12	2,23

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023

### Pengujian Hipotesis

**Tabel 2. Hasil Penelitian Independent Sample T-Test Rasio Kemandirian  
Levene's Test for Equality of Variances**

	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Rasio					,002
Kemandirian	Equal variances not assumed		-3,379	18,781	,003

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil penelitian tabel pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* rasio kemandirian memperoleh angka signifikansi  $0,002 < 0,05$  yang berarti Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan tidak memiliki varians yang sama atau tidak homogen. Pada kolom Signifikansi (*2-tailed*) memperoleh angka  $0,002$  dan  $0,003 < 0,05$  yang berarti H1 diterima menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan rasio kemandirian Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.

**Tabel 3. Hasil Penelitian Independent Sample T-Test Rasio Ketergantungan  
Levene's Test for Equality of Variances**

	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Rasio					,343
Ketergantungan	Equal variances not assumed		,964	27,334	,344

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* rasio ketergantungan memperoleh angka signifikansi  $0,750 > 0,05$  yang berarti Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan memiliki varians yang sama / homogen. Pada kolom Signifikansi (*2-tailed*) memperoleh angka  $0,343$  dan  $0,344 > 0,05$  yang berarti H2 ditolak menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio ketergantungan Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.

**Tabel 4. Hasil Penelitian Independent Sample T-Test Rasio Efektivitas  
Levene's Test for Equality of Variances**

	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
Rasio	Equal variances assumed	7,422	,011	,350	28	,729
Efektivitas	Equal variances not assumed			,350	18,348	,730

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* rasio efektivitas memperoleh angka signifikansi  $0,011 < 0,05$  yang berarti Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan

tidak memiliki varians yang sama / tidak homogen. Pada kolom Signifikansi (*2-tailed*) memperoleh angka 0,729 dan 0,730 > 0,05 yang berarti H3 ditolak menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio efektivitas Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.

**Tabel 5. Hasil Penelitian *Independent Sample T-Test* Rasio Efisiensi**

**Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Rasio Efisiensi	Equal variances assumed	,419	,523	-2,484	28	,019
	Equal variances not assumed			-2,484	26,383	,020

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* rasio efisiensi memperoleh angka signifikansi 0,523 > 0,05 yang berarti Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan memiliki varians yang sama / homogen. Pada kolom Signifikansi (*2-tailed*) memperoleh angka 0,019 dan 0,020 < 0,05 yang berarti H4 diterima menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan rasio efektivitas Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.

**Tabel 6. Hasil Penelitian *Independent Sample T-Test* Rasio Aktivitas (Belanja Rutin)**

**Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Rasio Aktivitas - BRutin	Equal variances assumed	1,385	,249	-3,110	28	,004
	Equal variances not assumed			-3,110	25,336	,005

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* rasio aktivitas (belanja rutin) memperoleh angka signifikansi 0,249 > 0,05 yang berarti Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan memiliki varians yang sama / homogen. Pada kolom Signifikansi (*2-tailed*) memperoleh angka 0,004 dan 0,005 < 0,05. yang berarti H5 diterima menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan rasio aktivitas Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.

**Tabel 7. Hasil Penelitian *Independent Sample T-Test* Rasio Aktivitas (Belanja Pembangunan)**

**Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Rasio Aktivitas - BPembangunan	Equal variances assumed	6,178	,019	,468	28	,643
	Equal variances not assumed			,468	24,158	,644

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian di atas pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* rasio aktivitas (belanja pembangunan) memperoleh angka signifikansi 0,019 < 0,05 yang berarti Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan tidak memiliki varians yang sama / tidak homogen. Pada kolom Signifikansi (*2-tailed*) memperoleh angka 0,643 dan 0,644 > 0,05. yang berarti H6 ditolak menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio aktivitas belanja pembangunan Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan.

## Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kedua kelompok tersebut. Dimana Kabupaten non Kepulauan memiliki angka rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten non Kepulauan dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya secara mandiri lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kepulauan. Yang tentunya dipengaruhi juga oleh tingkat penerimaan pendapatan asli daerah, dimana Kabupaten non Kepulauan memiliki penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi sehingga lebih mampu membiayai kegiatan pemerintahannya. Walaupun demikian jika dilihat dari angka rata-rata rasio kemandirian, Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan berada pada angka 4,80% dan 8,97% dikategorikan sangat rendah (0% – 25%).

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan kedua kelompok tersebut tidak jauh berbeda. Jika dilihat dari angka rata-rata rasio ketergantungan Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan berada pada angka 91,82% dan 90,23% dikategorikan tinggi / ketergantungan (75% - 100%) yang menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan masih sangat bergantung pada dana-dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena tingkat penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah, sehingga membuat pemerintah sangat bergantung pada dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena tingkat efektivitas yang tidak jauh berbeda. Dilihat dari angka rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan berada pada angka 100,16% dan 97,70% dikategorikan Sangat Efektif (>100%) dan Efektif (90% - 100%) yang berarti pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah dengan baik.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan terdapat perbedaan yang signifikan. Dilihat dari angka rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan berada pada angka 89,15% dan 95,35%, dimana Kabupaten Kepulauan memiliki angka rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten non Kepulauan namun angka rasio ini masih tergolong Cukup Efisien (80% - 90%) dan Kurang Efisien (90% - 100%) yang berarti tingkat kemampuan pemerintah belum efisien. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih tinggi, sedangkan untuk penerimaan pendapatan asli daerah lebih rendah.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Rasio Aktivitas Belanja Rutin Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan terdapat perbedaan yang signifikan. Dilihat dari angka rata-rata Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan berada pada angka 30,63% dan 33,81% yang berarti alokasi dana yang direalisasikan oleh pemerintah daerah cenderung direalisasikan untuk belanja rutin yang digunakan untuk belanja bulanan dan harian pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dibandingkan belanja pembangunan. Menurut Halim (2007) jika tingkat persentase dana yang dialokasikan pemerintah untuk belanja rutin cenderung tinggi maka dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan cenderung rendah. Hasil penelitian Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena angka rasio belanja pembangunan pada kedua kelompok yang cenderung rendah yang berada pada angka 11,61% dan 11,12% yang berarti sebagian besar dana yang dialokasikan pemerintah ada pada belanja rutin sehingga belanja pembangunan mendapat alokasi dana yang rendah/sedikit.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dijabarkan penulis di atas mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan di Sulawesi Utara, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan selama tahun anggaran 2014 – 2018 memiliki perbedaan yang signifikan dimana kelompok Kabupaten non Kepulauan memiliki rasio kemandirian yang lebih tinggi/lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan.
2. Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan selama tahun anggaran 2014 – 2018 tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dimana kedua kelompok ini memiliki rasio ketergantungan yang tidak berbeda jauh dalam jumlah yang besar, sehingga masih dalam kategori rasio yang sama.
3. Rasio Efektivitas Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan selama tahun anggaran 2014 – 2018 tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dimana kedua kelompok ini memiliki rasio efektivitas yang tinggi sehingga dikategorikan sangat efektif.
4. Rasio Efisiensi Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan selama tahun anggaran 2014 – 2018 memiliki perbedaan yang signifikan dimana kelompok Kabupaten Kepulauan memiliki rasio efisiensi yang lebih rendah/lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten non Kepulauan.
5. Rasio Aktivitas Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan selama tahun anggaran 2014 – 2018 untuk rasio belanja rutin memiliki perbedaan yang signifikan sedangkan untuk rasio belanja pembangunan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Walaupun rasio belanja rutin menunjukkan adanya perbedaan namun kedua kelompok ini memiliki angka rasio belanja rutin yang tinggi dibandingkan belanja pembangunan, karena kedua kelompok ini mengalokasikan realisasi dana yang tinggi untuk belanja rutin dan cenderung

rendah untuk belanja pembangunan.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan diatas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten non Kepulauan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya dengan melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peran sebagai pembayar pajak serta retribusi daerah, lebih mengenal dan meningkatkan potensi-potensi sumber pendapatan daerah seperti sumber daya alam sebagai kekayaan daerah yang nantinya akan mendorong tingkat perekonomian masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah juga dapat berpengaruh terhadap ketergantungan pemerintah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, semakin tinggi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi semakin kecil. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya melalui pengalokasian dana untuk belanja pembangunan yang lebih besar, hal ini nantinya akan mendapat respon positif dari masyarakat apabila masyarakat mendapat dengan mudah merasakan kesejahteraan dan kenyamanan lewat pembangunan yang ada.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan/referensi dalam cakupan penelitian yang sama dan diharapkan juga penelitian ini bisa dikembangkan dengan menggunakan analisis rasio, sampel, periode yang lebih banyak sehingga bisa mendapat gambaran perbedaan kinerja yang lebih luas, lebih terbaru dan lebih mendalam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Margono, (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mailangkay, P. P. U., Murni, S., & Van Rate, P. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 8, No. 3, 278 -285. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/29937/28987>. Diakses pada 15 Desember 2022
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianto, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Nurabiah. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 3, No. 1. <http://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/36>. Diakses pada 15 Desember 2022
- Pandensolang, J.D. & Mangantar, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 8, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/27534>. Diakses pada 09 Mei 2023
- Reuwpassa, A. R., Mangantar, M., & Maramis, J. B. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Di Tiga Kota Di Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado, Kota Bitung, Dan Kota Tomohon). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No.1, 378-385. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32186/30548>.
- Riyanto, S. & Hatmawan, A.A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: Indeks.

Waoma, S. (2019). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 2. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/194>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2022

Windhu, P.(2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: RajaGrafindo Persada.

